

# **KESENJANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA CLMV<sup>1</sup> DAN PENGARUHNTERHADAP ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015**

Andrias Darmayadi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Komputer Indonesia, Jl Dipati Ukur 114 – 116 Bandung

Email: andredarma@yahoo.com

## ***Abstract***

*In the goal of political stability and security of ASEAN, improve overall regional competitiveness in the world market, promote economic growth and reduce poverty and improve the living standards of ASEAN member countries then agreed to immediately realize the real economic integration, namely the ASEAN Economic Community (AEC) . AEC is a form of economic integration is planned to be achieved by 2015. However to note also is the phenomenon of regional integration which may widen the development gap between member countries of each negara. Terutama new members of ASEAN, namely Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam or known through terminology CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam) see more regional economic integration in the processes required and can not be avoided, which will bring benefits as well as challenges for them. CLMV countries are still many obstacles and challenges have economic sectors although in general these countries have enormous economic potential.*

*Key words: the ASEAN Economic Community, CLMV, Economic Growth*

## **Abstrak**

Dalam Tujuannya menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup Negara anggota ASEAN maka disepakati untuk segera mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata yaitu ASEAN Economic Community (AEC). AEC adalah bentuk integrasi ekonomi yang direncanakan akan tercapai pada tahun 2015. Namun yang perlu diperhatikan juga adalah fenomena integrasi kawasan yang mungkin memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota masing-masing negara. Terutama anggota baru ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal melalui terminologi CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam) melihat integrasi ekonomi regional yang lebih dalam sebagai proses yang diperlukan dan tidak dapat dihindari, yang akan membawa manfaat serta tantangan bagi mereka. Negara-negara CLMV masih banyak mempunyai kendala dan tantangan sektor-sektor ekonomi meskipun secara umum negara-negara tersebut mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar

Key words: ASEAN Economic Community, CLMV, Pertumbuhan Ekonomi

---

<sup>1</sup> CLMV adalah terminologi untuk kelompok negara anggota ASEAN yang terdiri dari : Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam)

## 1. Pendahuluan

ASEAN (*Association Southeast Asia Nation*) sebagai organisasi internasional regional kawasan Asia Tenggara yang terbentuk sejak tahun 1967 telah mengalami banyak perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan harapan dan cita-cita para pendiri organisasi kawasan ini, untuk menjalin persahabatan dan kerjasama dalam menciptakan wilayah yang aman, damai dan makmur. Dalam perkembangan selanjutnya ASEAN bersepakat untuk membentuk suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli dan terikat bersama dalam kemitraan dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 yang ditetapkan oleh para kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 15 Desember 1997.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan *Bali Concord II* pada KTT Ke-9 ASEAN di Bali pada 7 Oktober 2003 yaitu, menyepakati pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*)<sup>2</sup>. Komunitas ASEAN itu terdiri atas tiga pilar, yaitu:

1. Pilar Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community/APSC*),
2. Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), dan
3. Pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*).

Optimisme dan antusiasme negara anggota dalam membentuk Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu mengenai Percepatan Pembentukan Komunitas ASEAN

---

<sup>2</sup>Kementerian Luar Negeri RI, *ASEAN Selayang Pandang*, (Jakarta: Direktorat Kerja Sama ASEAN, 2012), hlm. 5.

pada tahun 2015 (*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*) oleh para Pemimpin ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007. Dengan demikian, pembentukan Komunitas ASEAN dipercepat dari tahun 2020 menjadi tahun 2015<sup>3</sup>.

Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) itu bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang memiliki pandangan maju, hidup dalam suatu lingkungan yang damai serta makmur dan stabil, yang disatukan oleh hubungan kemitraan secara dinamis serta menciptakan masyarakat yang saling peduli, yang dilandasi oleh tiga Pilar Komunitas ASEAN dengan memfokuskan terhadap masing-masing tujuannya. Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), melalui kerjasama ekonomi yang solid dan saling membantu satu sama lainnya akan membentuk stabilitas ekonomi di kawasan dan menjadikan negara-negara anggota ASEAN sebagai salah satu kekuatan besar ekonomi dunia, dan pada tahun 2015 akan menjadikan ASEAN sebagai organisasi internasional kawasan dimana aliran barang, jasa, investasi serta tenaga terampil dan modal lebih bebas bergerak di kalangan kesepuluh negara anggota ASEAN. Interaksi antar negara-negara anggota ASEAN juga menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal itu terlihat dalam berbagai kerjasama yang semakin luas dan mendalam di antara negara-negara anggota ASEAN maupun dengan negara-negara Mitra Wicara<sup>4</sup>, serta komitmen untuk berperan aktif dalam berbagai forum dengan tetap menghargai fleksibilitas masyarakat ASEAN.

---

<sup>3</sup>*Ibid* hlm. 6.

<sup>4</sup>ASEAN memiliki sebelas Negara Mitra Wicara Penuh yaitu Amerika Serikat, Australia, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), India, Jepang, Kanada, Republik Korea, Rusia, Selandia Baru, Uni Eropa (*European Union*) dan Badan Program Pembangunan PBB (*United Nations Development Programme/UNDP*)

Secara khusus, para pemimpin sepakat untuk mempercepat dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas dengan dibentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN. *ASEAN Economic Community (AEC)*, dibentuk guna mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu ASEAN memiliki empat karakteristik utama sebagaimana yang termuat dalam cetak biru (*blueprint*) Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), berikut<sup>5</sup> :

- a. Pasar tunggal dan basis produksi
- b. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi
- c. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan
- d. Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global

Kerjasama Ekonomi ASEAN merupakan realisasi akhir integrasi ekonomi yang didasarkan pada kepentingan bersama negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas. Keinginan memaksimalkan potensi ekonomi, merupakan motif terbesar dalam integrasi. Dengan keberadaan beberapa perekonomian raksasa (seperti China, Amerika Serikat dan Inggris), tidak memungkinkan bagi negara-negara kecil untuk bersaing, bahkan negara-negara adikuasa tersebut juga menjalin berbagai kesepakatan kerjasama dan mengintegrasikan diri mereka pada organisasi-organisasi regional. Oleh karena itu baik negara

berkembang maupun negara industri, negara lemah ataupun negara adikuasa, pada saat ini sama-sama melakukan integrasi karena ingin memiliki daya saing yang lebih baik<sup>6</sup>. Meskipun diakui bahwa integrasi ekonomi regional dapat meningkatkan konvergensi pendapatan di negara-negara di kawasan, akan tetapi ASEAN prihatin tentang risiko mengingat potensi kesenjangan yang ada dalam dimensi pendapatan dan pembangunan manusia di antara negara-negara anggotanya.

Integrasi ekonomi regional ASEAN telah berkembang pesat dengan peningkatan jumlah Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (*Free Trade Agreements*) dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi (*Economic Partnership Agreements*). Liberalisasi perdagangan internasional dan investasi menyertai proses integrasi diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah. Disatu sisi juga muncul fenomena integrasi kawasan yang mungkin memperlebar kesenjangan pembangunan antara negara-negara anggota masing-masing negara.

Beberapa anggota baru ASEAN, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal melalui terminologi dalam bahasa Inggris sebagai CLMV (*Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam*) melihat integrasi ekonomi regional yang lebih dalam sebagai proses yang diperlukan dan tidak dapat dihindari, yang akan membawa manfaat serta tantangan bagi mereka.

CLMV, memiliki sejumlah kesamaan, meskipun berbeda dalam ukuran pasar dan prioritas ekonomi. Kesamaan CLMV meliputi terutama-agro berbasis ekonomi transisi mereka, tingkat kemiskinan yang tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, dan lembaga-lembaga yang masih terlalu lemah untuk beralih ke ekonomi pasar. Meskipun CLMV telah menikmati tingkat tertentu

---

<sup>5</sup> Kementerian Luar Negeri RI, *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2013), hal. 9.

---

<sup>6</sup> Nuraeni S, et al., *Regionalisme: Dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 126.

stabilitas makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir tetapi tingkat pengangguran masih bertahan. CLMV masih menghadapi tantangan besar dalam memerangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan kekayaan antara populasi, dan mengatasi kesenjangan pembangunan di dalam daerah. Meskipun masing-masing negara di CLMV menghadapi kendala pengembangan yang berbeda, CLMV secara keseluruhan memiliki potensi besar untuk pengembangan ke depan, yang akan tergantung pada individu upaya negara dan dukungan dari mitra pembangunan di dalam dan luar daerah.

Sementara itu, dalam Komunitas Ekonomi ASEAN Para Kepala Negara ASEAN pada KTT mereka pada tahun 2000 di Singapura meluncurkan *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) melaluidan berbagai inisiatif regional lainnya melalui *road map* untuk integrasi ASEAN yang memungkinkan semua negara anggota untuk bergerak maju dalam cara yang terpadu dan merasakan manfaat dari integrasi ASEAN secara bersama (*Asean Economic Community*)<sup>7</sup>.

IAI adalah sebuah proyek yang mengupayakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang diperlukan oleh negara-negara ASEAN agar mampu berpartisipasi penuh dalam integrasi kawasan. Akhirnya, Komunitas Ekonomi ASEAN mengusahakan keselarasan kesepakatan ASEAN dengan peraturan dan undang-undang multilateral, dan membuat kebijakan yang akan lebih jauh mengintegrasikan kawasan tersebut dengan dunia. Untuk dapat merealisasikan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), setiap negara anggota perlu akan membuat penyesuaian-penyesuaian dengan mekanisme domestik mereka masing-masing sesuai

dengan rencana aksi tersebut. Secara intensif ASEAN melakukan kesepakatan-kesepakatan dalam menjalin kerjasama ekonomi.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Relasi Perkembangan ASEAN dan Pertumbuhan Ekonomi Negara Anggotanya

Dalam perkembangannya, ASEAN memiliki keanggotaan baru yang bergabung setelah organisasi regional tersebut sudah terbentuk selama 30 tahun, negara-negara yang baru bergabung itu adalah negara-negara di kawasan indochina yang merupakan kawasan yang dikuasai oleh negara komunis. Negara baru tersebut adalah Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau yang dikenal dalam terminologi bahasa Inggris sebagai CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Laos, dan Vietnam). Selain adanya perbedaan jarak waktu bergabung dengan negara anggota ASEAN lainnya, negara-negara CLMV ini juga memiliki perbedaan dari segi tingkat pertumbuhan ekonomi dengan negara anggota ASEAN lainnya yang cukup lebar.

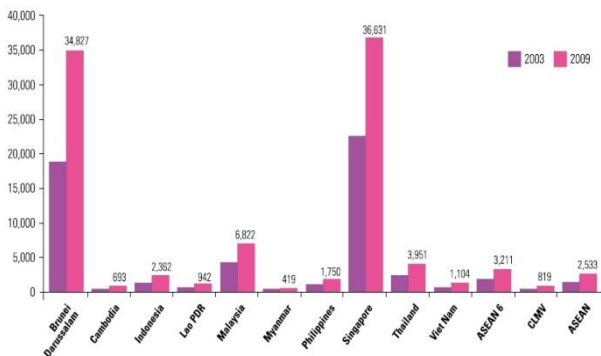
Negara-negara CLMV ini memiliki berbagai sejumlah kesamaan dalam keadaan perekonomian negara mereka, meskipun mereka berbeda dalam ukuran pasar mereka dan prioritas ekonomi. Pendapatan per kapita dari masing-masing negara yang rendah, dan sumber daya manusia yang terbatas. Kesamaan CLMV meliputi terutama-agro berbasis ekonomi transisi mereka, tinggi tingkat kejadian kemiskinan, infrastruktur yang tidak memadai, dan lembaga-lembaga yang masih terlalu lemah untuk beralih ke dalam ekonomi pasar apabila dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya.

Hal ini dapat dilihat dalam data laporan pendapatan per kapita dalam data tahun 2003-2009 seperti pada tabel berikut:

---

<sup>7</sup><http://www.asean.org/communitites/asean-economic-community/category/overview>, diakses pada tanggal 17 Mei 2014.

**Tabel 1. Gross Domestic Product (GDP) per kapita di Negara-Negara Anggota ASEAN**



Atas dasar harga yang berlaku; dalam \$ USD  
 Sumber data sudah diolah; ASEAN and Macroeconomic Database and IMF World Economic Outlook Database April 2010

## 2.2. Kesepakatan Menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015

ASEAN telah semakin dewasa dan memiliki ketahanan dalam menghadapi segala perkembangan dan tantangan baik di tingkat regional maupun global yang sangat dinamik. Era globalisasi ini telah menjadikan ketergantungan antar bangsa. ASEAN dalam hal ini juga telah mempersiapkan diri untuk berintegrasi kedalam masyarakat global yang akan diwujudkan melalui pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015. Dalam perkembangan selanjutnya, bahwa kedepannya ASEAN akan menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi; Mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. Yang tercantum dalam kesepakatan yang telah disepakati Visi ASEAN 2020 (ASEAN Vision 2020). Dengan sebuah harapan sebelum tahun 2020, ASEAN akan menjadi sebuah komunitas masyarakat yang peduli.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-6 ASEAN tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Vietnam, para pemimpin ASEAN mengesahkan Rencana Aksi Ha Noi (Ha Noi Plan of Action) yang merupakan langkah awal untuk merealisasikan tujuan dari Visi ASEAN 2020 (ASEAN Vision 2020). Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN juga mengeluarkan Statement on Bold Measures dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan pelaku usaha, mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi dan finansial.

Salah satu sektor yang diintegrasikan adalah ekonomi, biasanya dalam bentuk pasar bersama dimana negara-negara melakukan konsolidasi kegiatan perekonomian dengan meningkatkan potensi ekonomi masing-masing dengan cara: pertama, menghapuskan hambatan perdagangan, dan kedua, membuat satu kebijakan ekonomi tunggal. Kebijakan tersebut akan mengikat interaksi ekonomi dan adanya kesamaan sikap para anggota kepada negara-negara non-anggota. Terjadi perbedaan respon masyarakat terhadap proses integrasi ekonomi ini, sehingga setiap negara perlu sungguh-sungguh dalam mempertimbangkannya yaitu dari sisi perekonomian, tenaga kerja dan modal .

Krisis keuangan dan ekonomi yang terjadi di kawasan Asia Tenggara pada periode 1997-1998 memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. ASEAN Economic Community merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), di Bali, pada bulan Oktober tahun 2003 . Kemudian, ASEAN baru mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali, Indonesia pada tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (ASEAN Community). Kesepakatan Bali Concord II ini berisikan tiga poin penting, poin tersebut adalah rencana pembentukan ASEAN Economy Community (AEC) sebagai entitas ekonomi terpadu Asia

Tenggara, *ASEAN Security Community* (ASC) sebagai forum keamanan bersama, dan *ASEAN Sociocultural Community* (ASCC) yang erat dan saling menguatkan untuk tujuan menjamin stabilitas perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan.

*ASEAN Economic Community* merupakan realisasi tujuan akhir integrasi ekonomi sesuai Visi ASEAN 2020, yang didasarkan pada kepentingan bersama Negara Anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi melalui inisiatif yang telah ada dan inisiatif baru dengan kerangka waktu yang jelas. Untuk membentuk *ASEAN Economic Community* (AEC), ASEAN harus melaksanakan kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang terbuka, berwawasan keluar, inklusif dan berorientasi pada pasar, sesuai dengan aturan-aturan multilateral serta patuh terhadap sistem berdasarkan aturan hukum agar pemenuhan dan implementasi komitmen-komitmen ekonomi dapat berjalan efektif.

### 3. Pembahasan

#### 3.1. Kesenjangan Ekonomi antar Negara Anggota

Dalam mewujudkan *ASEAN Community* pada tahun 2015, khususnya Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), dimana salah satu karakteristiknya adalah untuk menciptakan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara. Sebuah aspek penting dari visi ASEAN yang lebih luas adalah untuk memastikan pembangunan yang manfaat dari integrasi ekonomi dan dibagi merata oleh semua negara anggota dan warga negara mereka. Konsep '*pembangunan ekonomi yang adil*' dianggap sebagai pilar utama dalam AEC. Sejalan dengan fokus pada pemerataan pembangunan, ada pengakuan bahwa upaya bersama dibutuhkan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antara negara-negara ASEAN untuk memastikan bahwa wilayah tersebut dapat bergerak maju secara

lebih terpadu terhadap pencapaian berbagai hasil yang terkandung dalam cetak biru<sup>8</sup> tersebut di atas.

#### 3.1.1. *Narrowing Development Gap* (NDG)

Mengingat adanya perbedaan tingkat pembangunan diantara negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi, maka perluasan dan pendalaman integrasi ASEAN harus disertai dengan kerjasama teknik dan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat integrasi ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN yang masih tertinggal, disini negara-negara anggota yang dimaksud adalah merupakan negara-negara yang baru bergabung menjadi anggota di ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau terkenal dengan sebutan CLMV (*Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam*) dalam terminologi bahasa inggris. Negara-negara tersebut memiliki kesenjangan ekonomi dengan negara-negara anggota ASEAN terdahulunya yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand atau yang sering disebut dengan ASEAN-6.

Negara-negara CLMV tersebut memiliki kesenjangan ekonomi dengan negara-negara anggota ASEAN terdahulunya yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand atau yang sering disebut dengan ASEAN-6. Kesenjangan pembangunan antara negara anggota ASEAN ini memang signifikan. Meskipun telah ada peningkatan yang cukup besar di dalam pencapaian pembangunan multidimensi di banyak negara anggota ASEAN (termasuk di negara-negara CLMV) selama 20 tahun terakhir, kawasan ASEAN terus ditandai dengan varians yang signifikan dalam pencapaian pembangunan. Sebagai contoh, pada tahun 2010 negara terkaya di ASEAN yakni Singapura, memiliki pendapatan

---

<sup>8</sup>Mark Gillivray dan David Carpenter (dengan kata pengantar oleh Sekjen ASEAN 2013), "*Narrowing the Development Gap in ASEAN*" (ASEC: Routledge, 2013), hlm. 1.

tahunan per kapita yang hampir 45 kali lipat lebih tinggi daripada negara anggota ASEAN termiskin yaitu negara Myanmar. Pada tahun yang sama, proporsi orang yang hidup di bawah \$US 1 per hari adalah 33,9 persen di negara Laos dan 28,3 persen di negara Kamboja, sementara itu hampir tidak ada orang yang hidup di bawah \$US 1 per harinya di negara Singapura atau Brunei Darussalam .

Kesenjangan yang melebar antar negara anggota ASEAN tidak hanya dalam pencapaian pendapatan, tetapi juga di bidang pendidikan dan kesehatan. Program Pembangunan PBB terbaru yaitu *Human Development Report (United Nations Development Programme/UNDP tahun 2012)*, berisi laporan *Human Development Index (HDI)*, yang merupakan indikator ringkasan dari prestasi masing-masing negara dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Menurut laporan ini, Singapura adalah negara ASEAN peringkat tertinggi dalam hal nilai HDI.

Posisi ke 26 dari 187 negara, dalam kategori 'pembangunan manusia sangat tinggi'. Memang , berada di peringkat lebih tinggi pada indeks ini dari negara United Kingdom (Inggris), yang merupakan negara yang menyediakan sejumlah besar Bantuan Pembangunan Resmi (*Official Development Assistance/ODA*) kepada negara-negara anggota ASEAN. Di ujung lain dari skala Myanmar, yang berada di peringkat 149 dalam nilai HDI masuk dalam kategori 'pembangunan manusia yang rendah' dengan sebagian besar negara-negara di bagian Afrika. Enam negara ASEAN berada di kategori 'pembangunan manusia menengah' . Oleh karena itu keanggotaan ASEAN melampaui seluruh spektrum pembangunan manusia sebagaimana dipahami oleh UNDP, dari kategori 'sangat tinggi' kedalam kategori 'rendah'.

Seluruh Pemimpin ASEAN menyadari bahwa dalam memajukan pembangunan suatu masyarakat, maka kesenjangan pembangunan yang ada di antara negara-negara anggota

ASEAN perlu dijembatani, terutama dalam hal pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia. Banyak upaya dalam menjembatani kesenjangan pembangunan yang telah dilakukan oleh ASEAN dengan dukungan dari banyaknya Mitra Wicara ASEAN dan organisasi internasional lainnya. Mitra Wicara ASEAN memahami sepenuhnya, bahwa jika kesenjangan tidak ditangani dengan benar maka akan sulit bagi negara-negara anggota untuk mewujudkan ASEAN *Economic Community* pada tahun 2015 (Internasional, 2011)<sup>9</sup>. Dalam menuju pelaksanaan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*), terdapat banyak isu yang berkaitan dengan realisasi AEC yang perlu dipertimbangkan. Salah satu tantangan utama adalah menemukan keseimbangan dalam hal keterpaduan dan dukungan di antara negara Anggota ASEAN menuju integrasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan (*Narrowing Development Gap/NDG*) dan meningkatkan daya saing ASEAN.

Sementara itu, dalam pertemuan Para Kepala Negara ASEAN pada KTT informal ke-4 mereka di Singapura pada tanggal 24-25 November tahun 2000 bersepakat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi diantara negara anggota ASEAN, khususnya negara-negara yang tergabung dalam CLMV, dengan meluncurkan *Initiative for ASEAN Integration (IAI)* yang akan mempersempit kesenjangan pembangunan (*Narrowing Development Gap/NDG*) dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai organisasi internasional regional dengan menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama regional dimana para anggota ASEAN yang lebih maju bisa membantu mereka negara-negara anggota yang paling membutuhkannya untuk integrasi

---

<sup>9</sup>Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, Buku Tanya Jawab Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN "ASEAN Community in a Global Community of Nations", (Kementerian Perdagangan RI, 2011), hlm. 23.

ASEAN yang memungkinkan semua negara anggota untuk bergerak maju dalam cara yang terpadu dan merasakan manfaat dari integrasi ASEAN secara bersama.

### 3.1.2. *Initiative for ASEAN integration (IAI)*

*Initiative for ASEAN Integration (IAI)* adalah suatu *policy framework* yang dimaksudkan untuk memberikan kontribusi, dengan dasar berkesinambungan, untuk mempersempit kesenjangan pembangunan (*Narrowing Development Gap/NDG*) di antara negara-negara ASEAN, khususnya untuk negara-negara CLMV, yang dibentuk oleh Para Kepala Negara ASEAN di Singapura pada tahun 2000. Kebijakan dimaksud ditegaskan di dalam *Ha Noi Plan of Action 1998* yang merupakan salah satu upaya ASEAN dalam mewujudkan harapan dan cita-cita ASEAN sesuai yang tercantup dalam Visi ASEAN 2020 yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1997.

Tahun berikutnya para Menteri Luar Negeri ASEAN mengadopsi Deklarasi Ha Noi *Declaration* mengenai *Narrowing Development Gap for Closer ASEAN Integration 2001*, yang menyatakan "...Untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara-negara anggota ASEAN dan antara ASEAN dengan seluruh dunia demi terjalin wilayah yang dinamis dengan pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kita." yang mengakui bahwa manfaat dari globalisasi pada saat ini tidak merata dan kesenjangan pembangunan antara negara-negara dan daerah akan lebih melebar tanpa langkah-langkah efektif untuk mengatasi dampak negatif dari globalisasi<sup>10</sup>.

<sup>10</sup>Rony Soerakoesoemah, "*Initiative for ASEAN integration: Promoting an Integrated Approach to Rural Connectivity*" *Slideshow* disajikan dalam Konferensi The ASEAN Rural Connectivity Conference for Education and Development, Melia Ha Noi Hotel, Ha Noi Vietnam 21-23 September 2011.

Mempromosikan, melalui upaya bersama, kerja sama yang efektif dan saling membantu dalam mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara-negara anggota ASEAN dan antara ASEAN dan dunia global. Secara operasional, upaya mempersempit kesenjangan pembangunan wajib untuk mencapai target ASEAN dan komitmen untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yaitu untuk mencapai integrasi ekonomi yang lebih erat, untuk mendapatkan keuntungan dari skema ASEAN, untuk kegiatan integrasi ekonomi regional, untuk melengkapi upaya nasional secara langsung ditujukan pada pengurangan kemiskinan dan promosi pembangunan yang adil dan inklusif.

Melalui program kerja IAI (*IAI Work Plan*) selama 6 tahun terhitung mulai dari Juli 2002 hingga Juni 2008, terdapat 232 proyek yang harus digarap oleh negara-negara CLMV yang tengah di biayai oleh kontribusi dari ASEAN-6 dan negara-negara Mitra Wicara ASEAN serta Badan-Badan Pembangunan lainnya. Hasil akhir selama pengerjaan program *IAI Work Plan* ini tidak terselesaikan tepat waktu. Sampai pada batas akhir yang ditentukan yaitu tahun 2008 pelaksanaan program tersebut hanya mampu menyelesaikan sekitar 78% dari total proyek keseluruhan. Akhirnya program *IAI Work Plan* rampung terselesaikan pada tahun 2012. Sehingga dibentuklah Rencana Kerja IAI lanjutan tahap dua yang disebut *IAI Work Plan II* yang dimulai dari Juli 2009 hingga Juni 2015 (sebelum pemberlakuan ASEAN Community 2015).

Rencana Kerja *Initiatives for ASEAN Integration (IAI)* untuk mempersempit kesenjangan pembangunan didorong terutama oleh Rencana Kerja IAI atau *The IAI Work Plan* yang telah mengabdikan sebagian besar kapasitas. Terutama diarahkan pada anggota baru ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV) untuk memenuhi target komitmen ASEAN. Rencana Kerja IAI akan mencakup tindakan-tindakan yang sangat penting dan perlu untuk bergerak



maju dalam cara yang terpadu. Sementara peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia adalah kunci untuk berjalannya rencana kerja IAI, ada kebutuhan untuk mendorong pembangunan infrastruktur sebagai sarana untuk meningkatkan integrasi ASEAN.

Upaya sedang dilakukan untuk melaksanakan Rencana Kerja IAI, yang diadopsi oleh para pemimpin ASEAN di Phnom Penh pada tahun 2002. Rencana Kerja IAI adalah Rencana 6 tahun dimulai pada Juli 2002 sampai dengan Juni 2008, dalam empat bidang, yaitu infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, dan integrasi ekonomi. Semuanya ini melibatkan pengembangan kerangka hukum, kelembagaan dan peraturan dan pembangunan kemampuan teknis dan kapasitas dari Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV). Rencana kerja ini akan didahului dengan pendalaman studi untuk memastikan kebijakan yang tepat, kerangka kelembagaan dan hukum. Sumber pendanaan terhadap proyek-proyek yang akan diimplementasikan melalui Initiative for ASEAN Integration (IAI) Work Plan tersebut berasal dari kontribusi negara-negara anggota ASEAN terdahulunya yaitu ASEAN-6, negara-negara yang tergabung dalam Mitra Wicara ASEAN. Badan-badan Pembangunan dan para pendonor lainnya :

1. IAI Development Cooperation Forum (IDCF)
2. IAI Task Force

Rencana Kerja IAI diimplementasikan melalui beberapa bentuk :

1. Infrastruktur
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
4. Integrasi Ekonomi Regional

### **3.1.3. Kesiapan Negara – Negara CLMV Dalam Menghadapi AEC 2015**

Tujuan Mempersempit Kesenjangan Pembangunan (*Narrowing Development*)

*Gap/NDG*) kemudian dapat dikonversi menjadi instrumen kebijakan rencana nasional di masing-masing negara CLMV. Kepemilikan proyek nasional merupakan bagian fundamental yang penting dari agenda ASEAN saat ini untuk mempersempit kesenjangan pembangunan. Para pemimpin ASEAN telah menekankan bahwa *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) pada dasarnya adalah sebuah mekanisme dari ASEAN-6 untuk memberikan bantuan kepada negara-negara CLMV dalam pencapaian hasil cetak biru. Negara anggota ASEAN-6 diharapkan untuk menyediakan sumber daya untuk kegiatan Rencana Kerja IAI dan juga memberikan dukungan bilateral langsung bagi negara-negara CLMV.

Rencana Kerja IAI dan agenda untuk mempersempit kesenjangan pembangunan yang lebih luas, juga dirancang untuk menggembleng dan fokus dukungan dari mitra wicara ASEAN, yang didorong untuk memberikan dukungan tambahan untuk kegiatan IAI. Seluruh penekanannya adalah untuk memastikan bahwa negara-negara CLMV dibangun ke dalam desain dari semua program kerja sama dan kegiatan ASEAN. Selain dengan bantuan melalui *policy framework* ASEAN dalam rangka mempersempit kesenjangan pembangunan antar negara anggota ASEAN dalam menyambut ASEAN *Economic Community* (AEC) dengan program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) khususnya bagi negara anggota baru yang tergabung dalam CLMV melalui *IAI Work Plans I*, negara-negara CLMV ini juga perlu mempersiapkan negara mereka dalam menyambut AEC pada tahun 2015, diantaranya kesiapan negara-negara tersebut sebagai berikut:

#### **A. Kamboja**

Hasil dari bantuan program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) PDB per kapita negara Kamboja dari tahun 2002 hingga tahun 2008 mengalami peningkatan dari US\$ 326.882 Milyar menjadi US\$ 710.885 Milyar atau meningkat sebesar 6.6% selama 6 tahun tersebut. Negara ini menerapkan rencana lima

tahun yang disebut Rencana Pembangunan Strategis Nasional (*National Strategic Development Plans/NSDP*) untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, tujuan utamanya yaitu untuk ditetapkan menjadi gerak Strategi Triangular pemerintah berfokus pada pertumbuhan, lapangan kerja, ekuitas, dan efisiensi. Pengembangan sumber daya manusia dan promosi perdagangan serta investasi asing sangat penting bagi pembangunan masa depan.

### B. Laos

Hasil dari bantuan program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) PDB per kapita negara Laos dari tahun 2002 hingga tahun 2008 mengalami peningkatan dari US\$ 317 Milyar menjadi US\$ 862 Milyar atau meningkat sebesar 7.7% selama 6 tahun tersebut. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, dan promosi berbasis sumber daya alam industri akan mengubah darinegara terkurung daratan “*land-locked*” menjadi yang negara yang menyatu “*land-linked*”. Diharapkan juga bahwa ini akan memberikan akses pelabuhan penuh dari Laos ke negara-negara tetangga dan jaringan regional lainnya dari jalan dan kereta api. Sektor prioritas tersebut diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan proses pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Laos juga mencanangkan *Battery of ASEAN* dengan memanfaatkan peran vitalnya sebagai hub bagi pertumbuhan ekonomi di *mainland* ASEAN. Selain anggota ASEAN, Laos menjadi anggota pada sejumlah organisasi internasional seperti PBB dan badan-badan khususnya, GNB, G-77, *Great Mekong Sub Region* (GMS), ASEM dan pada awal 2013 telah diterima menjadi anggota WTO (Potensi Perdagangan Laos, 2014)<sup>11</sup>. Dalam *National Social-Economic Development Plan* (NSEDP) ke-7 periode 2011-2015, pemerintah Laos menargetkan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata 8%.

---

<sup>11</sup>“Potensi Perdagangan Laos”, Buletin Komunitas ASEAN Edisi IV, Jakarta 4 Maret 2014, hlm. 13.

### C. Myanmar

Hasil dari bantuan program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) PDB per kapita negara Myanmar dari tahun 2002 hingga tahun 2008 mengalami peningkatan dari US\$ 149 Milyar menjadi US\$ 587 Milyar atau meningkat sebesar 3.6% selama 6 tahun tersebut. Potensi yang sangat besar dan belum dimanfaatkan Myanmar untuk pembangunan ekonomi masadepan negaranya adalah terletak pada besarnya potensi pasar lokal negaranya, sumber daya alam yang melimpah, dan tenaga kerja yang muda. Meskipun negara ini berurusan dengan sejumlah masalah domestik dan internasional, negara ini berkomitmen untuk integrasi ekonomi regional.

Empat tujuan ekonomi Myanmar (Pedoman Dasar Ekonomi terhadap Negara demokratis) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan pertanian sebagai dasar ekonomi bersama dengan sektor lain;
- b. Untuk memungkinkan sistem berorientasi pasar untuk berkembang dengan baik,
- c. Untuk memacu pembangunan ekonomi dengan bantuan teknis dan investasi mitra lokal dan asing, dan
- d. Untuk mempertahankan inisiatif untuk membentuk ekonomi nasional di tangan negara dan rakyat Myanmar. Pembangunan ekonomi Myanmar juga akan didorong oleh percepatan ekonomi reformasi, reformasi terutama keuangan, dan menyelaraskan nilai tukar; mempromosikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Zona Ekonomi Khusus (KEK), serta mengambil keuntungan dari lokasi geografis Myanmar antara China, India, dan negara-negara anggota ASEAN.

### D. Vietnam

Hasil dari bantuan program *Initiative for ASEAN Integration* (IAI) PDB per kapita negara Vietnam dari tahun 2008 hingga tahun 2008 mengalami peningkatan dari US\$ 440 Milyar menjadi US\$ 1,154 Milyar atau

meningkat sebesar 5.6% selama 6 tahun tersebut. Vietnam mulai proses reformasi ekonomi pada tahun 1986 dengan tujuan untuk proaktif terlibat dalam integrasi ekonomi internasional. Karena *headstart* awal, sekarang Vietnam dalam tempat yang relatif baik dalam proses reformasi. Hal ini penting, pada kenyataannya, mencapai Keuntungan sosial ekonomi dan meletakkan dasar yang lebih konkret untuk masa depan ekonomi pembangunan. Namun, masih menghadapi banyak tantangan reformasi, yang membuat menyadarnya tujuan tugas berat pembangunan. Tujuan pembangunan dasar Vietnam adalah<sup>12</sup>:

- a. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- b. Untuk menghindari status negara miskin pada tahun 2010 meskipun sangat mungkin bahwa ini tujuan akan direalisasikan pada tahun 2008;
- c. Untuk mempercepat industrialisasi dan proses modernisasi serta menjadikan Vietnam sebagai "sebuah negara industri yang modern" pada tahun 2020; dan
- d. Untuk merubah slogan negaranya menjadi "Orang-orang makmur, negara kuat, adil, demokratis, dan beradab masyarakat."

Rekomendasi kebijakan utama adalah

- a. Untuk mempromosikan komparatif keuntungan Vietnam dan bergerak di sepanjang rantai nilai dengan: (i) diversifikasi/membedakan produk ekspor dan memperkuat daya saing non-tarif, (ii) menarik efisien investasi asing langsung (FDI), dan (iii) peningkatan manajemen tenaga kerja dan keterampilan;
- b. Untuk mempercepat reformasi perusahaan milik negara (BUMN) dengan penekanan pada besar perusahaan dan *equitization* dan daftar mereka di pasar saham;

- c. untuk meletakkan prasyarat keuangan yang lebih baik untuk pengembangan pasar, terutama obligasi korporasi pasar dan untuk membangun sistem pengawasan keuangan yang efektif serta modal liberalisasi rekening yang tepat, dan;
- d. untuk memperdalam reformasi pajak, terutama yang berkaitan dengan administrasi perpajakan dan pajak aset dalam rangka memperluas basis pajak.
- e. Saat ini Vietnam berada dalam transisi untuk menjadi ekonomi industri dan modern dengan prioritas untuk menstabilkan ekonomi, membentuk infrastruktur kelas dunia, menciptakan tenaga kerja terampil, dan memperkuat lembaga berbasis pasar. Dalam Strategi Perkembangan Sosio-Ekonomi (SEDS) untuk tahun 2011-2020, Vietnam berusaha mencapai tingkat pendapatan per kapita sebesar \$US 3.000 pada tahun 2020, ini berarti pertumbuhan tahunan hampir 10% dalam pendapatan per kapita selama dekade berikutnya<sup>13</sup>.

#### 4. Kesimpulan

Untuk dapat merealisasikan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*), setiap negara anggota perlu akan membuat penyesuaian-penyesuaian dengan mekanisme domestik mereka masing-masing sesuai dengan rencana aksi tersebut. Oleh karena itu, upaya-upaya dalam terwujudnya pembentukan Integrasi Ekonomi ASEAN diperlukan komitmen yang kuat dari semua negara anggota. Komunitas Ekonomi ASEAN adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut maka asean akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi aliran barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran

---

<sup>12</sup>Chap Sotharith, "Development Strategy for CLMV in the Age of Economic Integration", *ERIA*, (Maret 2008), hlm. 5.

---

<sup>13</sup>"Potensi Pasar Vietnam", Buletin Komunitas ASEAN Edisi IV, Jakarta 4 Maret 2014, hlm. 9.

modal yang lebih bebas. Adanya aliran komoditas dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif, dengan perkembangan ekonomi yang merata dan berkurangnya kemiskinan serta perbedaan status sosial-ekonomi. Namun, pencapaian tersebut bukan merupakan suatu pencapaian yang mudah melainkan sebuah tantangan sebagai bentuk kerja keras ASEAN dalam menjawab tantangan tersebut.

Mengingat adanya perbedaan tingkat pembangunan diantara negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam bidang ekonomi, maka perluasan dan pendalaman integrasi ASEAN harus disertai dengan kerjasama teknik dan pembangunan untuk mengatasi kesenjangan dan mempercepat integrasi ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN yang masih tertinggal, disini negara-negara anggota yang dimaksud adalah merupakan negara-negara yang baru bergabung menjadi anggota di ASEAN yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam atau terkenal dengan sebutan CLMV.

Dengan hasil dari IAI *Work Plan* 2002-2008 memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara CLMV, akan tetapi negara-negara CLMV tersebut perlu lebih bekerja keras lagi dalam menghadapi ASEAN *Economic Community* 2015, dengan mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya tanpa bantuan lagi dari program IAI untuk kedepannya, akan tetapi mengembangkan potensi-potensi dalam negerinya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari masing-masing negara CLMV. Karena masih dibutuhkan waktu yang panjang lagi serta usaha lebih dari negara-negara CLMV untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang setara dengan negara-negara anggota ASEAN terdahulunya yaitu negara-negara yang tergabung kedalam ASEAN-6.

## Daftar Pustaka

- Asean Economic Community*. Dipetik Mei 17, 2014, dari ASEAN: <http://www.asean.org/communitites/asean-economic-community/category/overview>
- Gillivray, M., & Carpenter, D. (2013). *Narrowing The Development Gap in ASEAN*. ASEC: Routledge.
- Internasional, D. J. (2011). *Buku Tanya Jawab Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN "ASEAN Community in a Global Community of Nations"*. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI.
- Potensi Pasar Vietnam. (2014, Maret 4). *Buletin Komunitas ASEAN, IV*, 9.
- Potensi Perdagangan Laos. (2014, Maret 4). *Buletin Komunitas ASEAN*, 13.
- Republik Indonesia, K. L. (2012). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Direktorat Kerja Sama ASEAN.
- RI, K. L. (2013). *Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN.
- Soerakoesoemah, R. (2011, September 21 - 23). *Initiative for ASEAN integration: Promoting an Integrated Approach to Rural Connectivity*. Melia Ha Noi Hotel, Hanoi, Vietnam.
- Sotharith, C. (2008). *Development Strategy for CLMV in the Age of Economic Integration*. ERIA.
- Suparman, N. (2010). *Regionalisme: Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibisono, M. (2006). *Tantangan Diplomasi Multilateral*. Jakarta: LP3ES.

